

Implementasi Peranan Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga Dalam Upaya Perlindungan Objek Wisata Di Nagari Harau Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota Menurut Uu No 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan

Putri Dara¹, Yenti Astarie Dewi²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambel Bukittinggi

Email: putridara2003@gmail.com¹, yentiastariedewi@gmail.com²

Abstrak

Penelitian ini mengkaji implementasi peran Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (DISPARPORA) Kabupaten Lima Puluh Kota dalam melindungi objek wisata di Nagari Harau berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan. Fokus penelitian dilatarbelakangi oleh peningkatan signifikan kunjungan wisatawan ke Kawasan Lembah Harau, yang memerlukan pengelolaan berkelanjutan. Namun, beberapa tantangan masih ditemukan, seperti keterbatasan peran DISPARPORA dalam perlindungan hukum, partisipasi masyarakat yang belum maksimal, serta fasilitas pendukung pariwisata syariah yang belum memadai. Tiga isu utama yang diteliti meliputi: Strategi DISPARPORA dalam melindungi objek wisata, upaya peningkatan promosi destinasi, dan penerapan kebijakan sesuai UU No. 10 Tahun 2009. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan analisis dokumen. Responden terdiri dari pejabat dinas terkait, warga lokal, dan pengunjung wisata. Temuan penelitian mengungkap bahwa DISPARPORA telah berupaya melestarikan lingkungan, menjamin keadilan sosial, dan menyediakan fasilitas ramah syariah. Namun, efektivitasnya masih terhambat oleh masalah kebersihan dan kurangnya sertifikasi halal. Promosi dilakukan secara digital dan interaktif, meski perlu pengembangan lebih lanjut. Implementasi UU No. 10 Tahun 2009 diwujudkan melalui Perda setempat, namun evaluasi berkala diperlukan untuk memastikan kesesuaian dengan tujuan pembangunan pariwisata berkelanjutan.

Kata Kunci: Peranan Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga, Perlindungan Objek Wisata.

Abstract

This research examines the implementation of the role of the Department of Tourism, Youth and Sports (DISPARPORA) of Lima Puluh Kota Regency in protecting tourist attractions in Nagari Harau based on Law Number 10 of 2009 concerning Tourism. The focus of the research is motivated by the significant increase in tourist visits to the Harau Valley Area, which requires sustainable management. However, several challenges are still found, such as the limited role of DISPARPORA in legal protection, community participation that has not been maximized, and inadequate supporting facilities for sharia tourism. The three main issues studied include: DISPARPORA's strategy in protecting tourism objects, efforts to increase destination promotion, and policy implementation according to Law No. 10/2009. The research method used a descriptive qualitative approach with data collection techniques through in-depth interviews, field observations, and document analysis. Respondents consisted of relevant

agency officials, local residents, and tourist visitors. The research findings reveal that DISPARPORA has made efforts to preserve the environment, ensure social justice, and provide sharia-friendly facilities. However, its effectiveness is still hampered by hygiene issues and lack of halal certification. Promotion is digital and interactive, although further development is needed. Implementation of Law No. 10/2009 is realized through local regulations, but periodic evaluation is needed to ensure conformity with sustainable tourism development goals.

Keywords: *Role of the Tourism Office, Youth and Sports, Protection of Tourist Attractions.*

PENDAHULUAN

Biro pariwisata, anak muda serta berolahraga kabupaten lima puluh kota ini memiliki perbuatan andil antara lain ialah: 1) Melaksanakan formulasi kebijaksanaan wilayah di aspek pengurusan serta pengembangan destinasi pariwisata, 2) Melaksanakan Formulasi serta kategorisasi kebijaksanaan teknis pengurusan serta pengembangan kepariwisataan, 3) Melaksanakan Formulasi serta kategorisasi konsep teknis pengembangan kepariwisataan 4) Formulasi serta penyusunan kebijaksanaan metode mengenai kerjasama wilayah aspek pariwisata atas pihak lain. Melaksanakan Pe, 5) kumpulan serta penginventarisan informasi kepariwisataan Kabupaten cocok standard nasional, 6) Selaku eksekutif advertensi serta penjualan darmawisata, 7) Selaku eksekutif Cara Pemberian permissi upaya pariwisata rasio Kabupaten, 8) Selaku eksekutif koordinasi atas pihak terpaut

dalam pengurusan destinasi, penjualan serta kemitraan pariwisata, 9) Selaku eksekutif Monitoring, penilaian serta peliputan di bidanga pariwisata buat kategorisasi pemograman tahun berikutnya.¹

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, pariwisata merupakan keseluruhan kegiatan yang berkaitan dengan sektor tersebut dan bersifat multidimensi serta multidisiplin. Kegiatan ini muncul sebagai wujud dari kebutuhan individu dan negara, serta melibatkan interaksi antara wisatawan dengan masyarakat lokal, sesama pelancong, pemerintah, otoritas daerah, dan pelaku bisnis. Sementara itu, wisata didefinisikan sebagai perjalanan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang untuk mengunjungi suatu tempat tertentu dengan tujuan rekreasi, pengembangan diri, atau mempelajari keunikan daya tarik destinasi yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Wisatawan merujuk pada

¹ Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota

orang yang melakukan kegiatan wisata tersebut..²

Pariwisata selaku kejadian akan dikala ini lagi terkenal buat dibesarkan selaku penghasil devisa negeri atas non migas, sebab industry pariwisata relatif tidak memunculkan pencemaran ataupun juga kehancuran area. Atas era ke era terus menjadi banyak nya tempat darmawisata akan terdapat di bermacam wilayah, mulai atas darmawisata akan berhubungan atas gradasi alam atau gradasi akan lain. Terus menjadi canggihnya kemajuan era makan terus menjadi banyak serta mutahir pula darmawisata akan di buat oleh orang.

Bersumber atas objeknya, pariwisata dibedakan jadi sebutan tipe, ialah Cultural Tourism akan berarti tipe pariwisata akan diefekkan sebab terdapatnya energi raih atas seni serta adat sesuatu tempat ataupun wilayah, Political Tourism akan berarti tipe pariwisata buat melaksanakan ekspedisi tujuannya memandang ataupun melihat sesuatu insiden atau peristiwa akan berkaitan atas aktivitas sesuatu negeri misalnya melihat peringatan hari kebebasan sesuatu negeri, Social Tourism akan berarti tipe pariwisata dimana atas bidang penyelenggaraannya tidak menakankan buat

mencari profit semacam study tour, picnic serta lain- lain, dan Religion Tourism akan berarti tipe pariwisata dimana dorongan pegawai buat melaksanakan ekspedisi tujuannya memandang ataupun melihat upacara- upacara keagamaan.³

Pariwisata syariah yakni darmawisata akan mana turis mukmin pula menawarkan layanan serta sarana darmawisata dinikmati oleh turis non- muslim bila penuhi paling tidak 3 keinginan prinsip bawah atas turis mukmin, ialah terdapatnya sarana serta jasa ritual atas fasilitas akan mencukupi serta ramah buat turis mukmin semacam penginapan syariah, santapan serta minuman atas agunan halal lewat sertifikasi agensi khusus akan berhak, dan tujuan darmawisata semacam pariwisata darmawisata alam, darmawisata adat, ataupun darmawisata ciptaan akan dilengkapi atas alat ataupun infrastruktur ibadah semacam terdapatnya tempat ibadah di posisi tempat subjek darmawisata.

Buat Ajaran DSN MUI Nomor. 108 mengenai Prinsip Pariwisata Syariah, dipaparkan kalau kemajuan darmawisata syariah di Indonesia hadapi perkembangan akan amat cepat. Perihal ini nampak atas upaya serta pelayanan(perhotelan, restoran,

² Ni Ketut Riani, *Pariwisata yakni pisau bermata 2*, Jurnal Inovasi Penelitian, Vol 2 No 5 Oktober 2021, Hal 1469.

³ I Ketut Suwena dan I Gusti Ngurah Widyatmaja, *Pengetahuan Dasar Ilmu Pariwisata*, Pustaka Larasan, Bali, 2017, hlm. 20.

dinas ekspedisi wisata, serta SPA) akan dibesarkan serta dipromosikan oleh Kemenparekraf Ridi 12(2 simpati) destinasi subjek darmawisata syariah di Indonesia antara lain Aceh, Sumatera Barat, Riau, Lampung, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, NTT(Lombok), serta Sulawesi Selatan.⁴

Indikator pariwisata halal aplikasi Ajaran DSN MUI mengenai prinsip penajaan pariwisata atas Destinasi Darmawisata terpaut: 1) Menjaga kebersihan, kelestarian alam, sanitasi& area, 2) Meluhurkan nilai-nilai sosial-budaya& kebijakan lokal akan tidak melanggar prinsip syariah, 3) Harus mempunyai sarana ibadah akan pantas gunakan, gampang dijangkau& penuhi persyaratan syariah, 4) Harus mempunyai santapan& minuman halal akan aman kehalalannya atas Akta Halal MUI 5) Harus bebas atas kemusyrikan& khurafat 6) Harus bebas atas maksiat, zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba& gambling 7) Harus bebas atas pementasan seni& adat dan pementasan akan berlawanan prinsip-prinsip syariah.⁵

Salah satu tempat darmawisata akan menarik yakni darmawisata di Nagari Harau akan ada di Kabupaten 5 Puluh Kota, Sumatera Barat, Indonesia. Bunda kota kabupaten ini terdapat di Sarilamak. Kabupaten ini mempunyai besar area 3. 354, 30 km². 5 Puluh Kota ialah salah satu kabupaten akan terletak di Provinsi Sumatera Barat. Wilayahnya berbatasan atas Kabupaten Rokan Asal serta Kabupaten Kampar di sisi utara, sebaliknya di buatan selatan berbatasan atas Kabupaten Tanah Latar serta Kabupaten Sijunjung.

Di Kecamatan Harau Kabupaten lima puluh kota Ada 145 Subjek darmawisata ialah 44(Subjek darmawisata Alam), 51(Subjek Darmawisata Adat), 14(Subjek Darmawisata Hasil Ciptaan Manuasia), 12(Darmawisata Atensi Spesial), 12(Darmawisata Kuliner), 5(Darmawisata Asal usul), 5(Agrowisata), 1(Darmawisata Religi), 1(Cendramata). Atas 145 Subjek darmawisata akan terdapat di Kecamatan Harau ada satu Subjek Darmawisata akan diatur oleh Biro Pariwisata, Anak muda serta Berolahraga Kabupaten 5 Puluh Kota, ialah Subjek Darmawisata Ngarai Harau. Subjek

⁴ Saepudin dan Sutomo, Analisis Perbandingan Hotel dan Pariwisata Syariah atas Konvensional Bogor, Bogor: Magister Manajemen Syariah IPB.

⁵ Muhammad Ghafur Wibowo. *Indeks Pariwisata Halal (Implementasi Fatwa DSN MUI Tentang*

Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah di Kota Bukittinggi). Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, Vol X No. 2, Hal 91.

darmawisata akan diatur oleh Biro Pariwisata, Anak muda serta Berolahraga cuma satu Subjek Darmawisata ialah Area Ngarai Harau. Informasi jumlah Kunjungan Subjek Darmawisata akan diatur oleh Biro Pariwisata Anak muda serta Berolahraga Kabupaten lima puluh kota atas tahun 2019-2023:⁶

Data Kunjungan Objek Wisata Lembah Harau

No	Tahun	Jumlah Kunjungan
1.	2019	390.545
2.	2020	389.946
3.	2021	285.221
4.	2022	389.988
5.	2023	381.366

Bersumber atas Bagan di atas, bisa disimpulkan kalau jumlah kunjungan turis buat melancong di subjek darmawisata Ngarai Harau tiap tahun fluktuasi. Tetapi begitu, atas 2(2) dasawarsa terakhir jumlah kunjungan turis lalu bertambah. Atas melonjaknya jumlah kunjungan turis pasti penguasa setempat serta pihak terpaut butuh melaksanakan penindakan akan bagus keatas subjek darmawisata akan terdapat begitu juga diatur dalam Hukum Bawah Negeri Republik Indonesia Tahun 1945 serta Hukum akan menata mengenai proteksi subjek darmawisata.

Buat Soejono, kalau andil yakni pandangan energik peran(status) akan mana bila seorang melaksanakan hak serta kewajibannya cocok atas tanggung jawabnya. Andil yakni serangkaian sikap akan tertib akan ditimbulkan sebab sesuatu kedudukan khusus. Andil pula dimaksud selaku sesuatu sikap akan diatur serta diharapkan seorang dalam posisi khusus, dan apresiasi seorang keatas metode memastikan tindakan serta aksi dalam suasana khusus bersumber atas peran sosialnya.⁷

Perlindungan hukum mencakup segala upaya untuk memenuhi hak-hak serta memberikan dukungan guna menciptakan rasa aman bagi saksi atau korban. Upaya ini merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam melindungi masyarakat dan dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti pemberian kompensasi, santunan, layanan kesehatan, dan bantuan hukum.

Menurut Setiono, perlindungan hukum merupakan tindakan atau usaha untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh pihak berwenang yang bertentangan dengan aturan hukum. Tujuannya adalah menciptakan ketertiban dan keamanan sehingga setiap individu dapat memperoleh haknya sebagai manusia yang bermartabat. Buat Kamus Besar Bahasa

⁶ Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota

⁷ Soerjono Soekanto, 2002, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 212.

Indonesia, mendeskripsikan proteksi hukum selaku tempat bersembunyi, aksi(perihal serta serupanya) mencegah. Pemaknaan tutur proteksi atas cara kebahasaan mempunyai kesamaan unsur- unsur, ialah aksi mencegah, faktor cara- cara mencegah, alhasil mencegah atas pihak- pihak khusus atas memakai metode khusus.⁸

Buat Peraturan Penguasa Nomor. 24 Tahun 1979, kalau subjek darmawisata yakni konkretisasi atas buatan orang, aturan hidup, seni adat dan asal usul bangsa serta tempat kondisi alam akan memiliki energi raih buat didatangi. Sebaliknya dalam Hukum Pariwisata Nomor 10 tahun 2009 obyek darmawisata yakni tempat ataupun kondisi alam akan mempunyai pangkal energi darmawisata akan dibentuk serta dibesarkan alhasil memiliki energi raih serta diusahakan selaku tempat akan didatangi turis.⁹

Bedasarkan tanya jawab bisa disimpulkan dasar biro terpaut di Kabupaten 5 Pulu Kota, spesialnya di Kecamatan Harau, senantiasa berusaha mencegah subjek darmawisata sebab tingginya jumlah kunjungan turis. Tetapi, atas bidang pariwisata halal, proteksi akan diserahkan belum seluruhnya maksimal. Dikala ini, subjek darmawisata biasanya telah

mempunyai tempat ibadah, namun santapan serta minuman akan dijual belum seluruhnya mempunyai sertifikasi halal. Biro berencana tingkatkan kedudukan dalam proteksi subjek darmawisata, spesialnya terpaut pariwisata halal. Perihal ini dibantu oleh Pokdarwis(Golongan Siuman Darmawisata) Kecamatan Harau, akan melaporkan kalau sarana buat mensupport pariwisata syariah sedang dalam langkah pengembangan serta penilaian. Dikala ini, sarana akan ada terkini hingga tempat ibadah, alhasil sedang butuh kenaikan alat lain buat mensupport proteksi hukum pariwisata syariah.

Periset pula melaksanakan observasi(pemantauan) dini di alun- alun nampak kalau, memanglah Proteksi ataupun kontrol atas tempat darmawisata di harau sedang memakai proteksi akan biasa, alhasil atas perihal itu jadi perihal akan kurang penting buat dijadikan alas buat proteksi darmawisata di harau, hingga atas perihal itu pastinya di perlukan andil lebih lanjut atas Biro Pariwisata, Anak muda serta Berolahraga akan lebih efisien serta berdaya guna buat proteksi darmawisata di harau, setelah itu minimnya kedudukan anak muda setempat serta masyarakat di area subjek

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, Cet. 1, Jakarta, Balai Pustaka, hlm. 595.

⁹ Rizki Amelia, Adella Patricia, *Journal Of Tourism and Creativity*, Vol 5 No 1 Januari 2021, Hal 70.

darmawisata keatas proteksi darmawisata di Nagari Harau.

Bersumber atas kerangka balik permasalahan serta kejadian permasalahan di atas, hingga periset terpikat buat menggali data lebih dalam atas kasus akan terdapat atas judul penelitian **“Implementasi Peranan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dalam Upaya Perlindungan Objek Wisata di Nagari Harau Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota Buat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.**

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan tentang Pariwisata

Pariwisata yakni seluruh aktivitas akan dicoba oleh seorang ataupun golongan orang atas cara berpindah- pindah atas satu tempat ke tempat lain buat sedangkan durasi atas tujuan buat menikmati keelokan alam bukan buat mencari nafkah.

Buat Hukum No 9 Tahun 1990 mengenai Kepariwisataan, kalau pariwisata yakni seluruh suatu akan berhubungan atas kepariwisataan tercantum perusahaan subjek serta energi raih darmawisata dan usaha- usaha akan berhubungan di aspek itu.

Buatan pariwisata dibuat atas 4(4) buatan selaku selanjutnya: 1) Pementasan(attraction) 2) Sarana(amenities) 3) Aksesibilitas(accessibilities) 4) Jasa bonus(ancillary).¹⁰

Pariwisata pula bisa dibedakan buat corak turis buat mendatangi sesuatu tempat ialah:

- a. Darmawisata Adat, yakni ekspedisi akan dicoba atas bawah kemauan buat meluaskan pemikiran hidup seorang atas jalur melangsungkan kunjungan ataupun pemantauan ke tempat lain ataupun luar negara buat mengenali kondisi warga di sesuatu wilayah, mengenali Kerutinan ataupun adat istiadat setempat, metode hidup, dan menekuni adat serta keseniannya.
- b. Darmawisata Dahulu kala, yakni tipe darmawisata akan banyak berhubungan atas aktivitas berolahraga di air, telaga, tepi laut, teluk, ataupun laut semacam memancing, melaut, menyelam, serta serupanya.
- c. Darmawisata Cagar Alam, yakni darmawisata akan umumnya diselenggarakan oleh agen ataupun dinas ekspedisi akan

¹⁰ Dwi Setiawan, I. B. “Identifikasi Potensi Wisata Beserta 4A (Attraction, Amenity, Accessibility, Anchillary) di Dusun Sumber Wangi, Desa

Pemuteran, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng.” Bali, Universitas Udayana.

mengistimewakan usaha- usaha atas jalur menata darmawisata ke tempat semacam cagar alam, halaman lindung, hutan atas pegunungan, serta serupanya akan kelestariannya dilindungi oleh hukum.

- d. Darmawisata Berolahraga, yakni darmawisata akan melaksanakan ekspedisi atas tujuan buat olahraga ataupun aktivitas aktif dalam acara berolahraga di sesuatu tempat.
- e. Darmawisata Menguntungkan, yakni ekspedisi turis buat mendatangi demonstrasi serta minggu raya akan bertabiat menguntungkan.
- f. Darmawisata Pabrik, yakni ekspedisi darmawisata akan dicoba segerombol turis semacam mahasiswa ataupun siswa ke sesuatu tempat pabrik dalam bagan riset.
- g. Darmawisata Kesehatan, yakni ekspedisi darmawisata akan bermaksud buat istirahat atas cara badan serta rohani.¹¹

Tinjauan tentang Pariwisata Syariah

Ajaran DSN- MUI No 108 atau DSN- MUI atau X atau 2016 mengenai Prinsip

Penajaan Pariwisata Bersumber atas Prinsip Syariah, kalau pariwisata syariah yakni darmawisata akan cocok atas prinsip syariah.¹² Pariwisata syariah ataupun akan lebih diketahui atas pariwisata halal yakni pariwisata akan memajukan angka keIslaman di tiap kegiatan akan dicoba. Sebutan pariwisata halal atas cara arti digolongan para pelakon darmawisata sedang mengarah asing.¹³

Pariwisata halal merujuk atas penyediaan produk serta layanan kepariwisataan akan penuhi keinginan turis mukmin buat menyediakan ibadah serta keinginan santapan akan cocok atas anutan Islam. Pariwisata halal ialah tipe darmawisata akan menganut nilai- nilai Islam, serta dalam analogi itu terbuat atas perkembangan Islam.¹⁴

Pariwisata berplatform syariah hendak menghasilkan suatu kegiatan ekonomi akan sudah berdasarkan atas prinsip syariah. Kenaikan pemasukan warga jadi normal, dan kenaikan perekonomian negeri. Kesiapan akan wajib dibantu atas masa modern ini berhubungan dalam perihal database kepariwisataan, web, sarana, posisi, dan

¹¹ Utama I Gusti Bagus Rai, *Pemasaran Pariwisata*, Yogyakarta: CV.Andi, 2017.

¹² Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

¹³ H. Inu Kencana Syafie, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, Jakarta: Mandar Maju, 2009, hal 15.

¹⁴ Kurniawan Gilang Widagdyo, "Analisis Pasar Pariwisata Indonesia, *The Journal of Tauhidinomics*, Vol. 1, No. 1, 2015, hal. 149.

layanan buat pemesanan pemindahan supaya bisa membuat aman buat para wisatawan.¹⁵

Determinasi destinasi subjek pariwisata syariah hal karakter pariwisata halal yakni 1) usaha pendapatan harus yakni digapai lewat ikhtiar atas mencakup terwujudnya faedah biasa, menjaga tepercaya, menciptakan kebaikan, menciptakan keamanan, meluhurkan nilai-nilai sosial adat, serta melindungi kebajikan lokal supaya tidak melanggar prinsip syariah, 2) sarana akan harus ada yakni alat ibadah akan pantas, dan santapan serta minuman akan telah nyata kehalalannya, 3) keadaan akan wajib dijauhi yakni kemusyrikan, minuman akan memabukkan, narkoba, gambling, kufarat, zina, serta pornografi, dan 4) pemindahan semacam perihalnya pembelahan bersandar antara pria serta wanita.¹⁶

Prinsip-prinsip pengembangan pariwisata berplatform syariah yakni pengembangan sarana darmawisata halal lebih penting terletak di dekat posisi darmawisata, sarana serta jasa akan berplatform syariah dipunyai serta dicoba warga dekat tempat darmawisata, dan

pengembangan darmawisata syariah wajib cocok atas nilai-nilai terhormat serta kebajikan lokal adat setempat akan sedang populer serta legal.

Buat Abdul Kadir Din ada 10(10) ketentuan sempurna akan wajib ada atas pariwisata syariah ialah: 1) Awareness ataupun identifikasi keatas destinasi darmawisata akan bagus atas bermacam alat advertensi. 2) Attractive ataupun menarik buat didatangi 3) Accessible ataupun bisa diakses atas arah akan aman 4) Available ataupun ada destinasi darmawisata akan nyaman 5) Affordable ataupun bisa dijangkau oleh seluruh buatan 6) A range of accomodation ataupun fasilitas akan dicocokkan atas kepribadian turis 7) Acceptance ataupun tindakan akan ramah atas warga atas turis 8) Biro ataupun agen akan membenarkan paket ekspedisi atas bagus 9) Attentiveness ataupun tindakan ramah akan direalisasikan dalam wujud akan memikat 10) Accountability ataupun akuntabilitas buat membenarkan keamanan, keamanan, serta tidak terdapat penggelapan.¹⁷

¹⁵ Rimet, "Strategi Pengembangan Wisata Syariah di Sumatera Barat: Analisis SWOT." *Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, Vol 2, No, 1, (2019), hal. 55.

¹⁶ Yudhi, Martha Nugraha, "Analisis Potensi Promosi Pariwisata Halal Melalui E-Marketing Pulau Riau." *Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah*

Lembaga Penelitian Universitas Trisakti, Vol 3, no 2, 2018, hal. 65.

¹⁷ Fahadil Amin, *Penyelenggaraan Pariwisata Halal di Indonesia (Analisis Fatwa DSN/MUI tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah)*, Jakarta, hal. 63.

Tinjauan tentang Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga

Buat melakukan kewajiban utama begitu juga diartikan dalam Artikel 3, Biro Pariwisata, Anak muda, serta Berolahraga memiliki guna:

kategorisasi pemograman aspek pariwisata, anak muda, serta olahraga

formulasi kebijaksanaan teknis aspek pariwisata, anak muda, serta olahraga

penerapan kebijaksanaan teknis aspek pariwisata, anak muda, serta olahraga

pembinaan, koordinasi, pengaturan, serta fasilitasi penerapan hal aspek pariwisata, anak muda, serta olahraga

penerapan penilaian serta peliputan aspek pariwisata, anak muda, serta olahraga

aplikasi kegiatan ketatausahaan Dinas Pariwisata, Anak belia, dan Berolahraga.

Buat Peraturan Bupati 5 Puluh Kota No 69 Tahun 2016 mengenai Peran Lapisan Badan, Kewajiban serta Guna dan Aturan Kegiatan Biro Pariwisata Anak muda serta Berolahraga, kalau Biro Pariwisata Anak muda Serta Berolahraga memiliki guna:

1. Formulasi kebijaksanaan teknis di aspek Pariwisata, Anak muda serta Olahraga
2. Penajaan hal rezim serta jasa biasa di aspek Pariwisata, Anak muda serta Olahraga

3. Pembinaan serta penerapan kewajiban di aspek Pariwisata, Anak muda serta Olahraga

4. Penerapan hal aturan upaya dinas

5. Penerapan kewajiban lain akan diserahkan oleh Bupati cocok atas kewajiban serta fungsinya.¹⁸

Tinjauan Tentang Pelaksanaan Perintisan Objek Wisata

Energi raih darmawisata yakni seluruh suatu akan mengefekkan seorang ataupun segerombol orang mendatangi sesuatu tempat sebab suatu itu mempunyai arti khusus, misalnya area alam, aset ataupun tempat asal usul serta insiden khusus. Subjek darmawisata dibuat jadi 2 jenis:

1. Darmawisata Alam, akan terdiri atas:

a. Pariwisata Bahari (Marine Tourism)

Merupakan kegiatan wisata yang memanfaatkan sarana dan prasarana kelautan seperti berenang, memancing, menyelam, dan berbagai olahraga air lainnya. Termasuk di dalamnya fasilitas akomodasi serta penyediaan makanan dan minuman.

b. Pariwisata Etnik (Ethnic Tourism)

Suatu bentuk perjalanan wisata yang bertujuan untuk mengamati dan mempelajari ekspresi budaya serta

¹⁸ Rencana Kerja DISPARPORA Kab Lima Puluh Kota 2022.

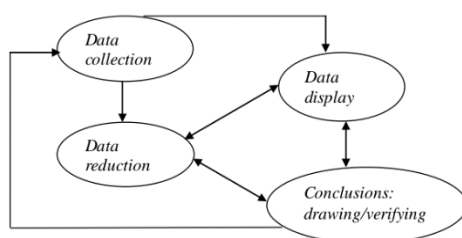
- pola kehidupan masyarakat tertentu yang dianggap unik dan menarik
- c. **Pariwisata Alam (Ecotourism)**
Bentuk kegiatan wisata yang berfokus pada penikmatan keindahan alam, udara segar pegunungan, keunikan satwa langka, serta keragaman flora yang tidak mudah ditemui di daerah lain.
 - d. **Pariwisata Berburu (Hunting Tourism)**
Jenis wisata yang dilakukan di negara-negara yang memiliki wilayah khusus atau hutan buru yang legal dan dikelola oleh pemerintah, biasanya dipromosikan oleh berbagai agen atau dinas pariwisata.
 - e. **Pariwisata Agro (Agrotourism)**
Bentuk wisata yang mengatur kunjungan ke lokasi pertanian, perkebunan, atau pusat pembibitan, dimana pengunjung dapat melakukan observasi dan penelitian, atau sekadar menikmati kehijauan tanaman di sekitarnya.
2. **Darmawisata Sosial– Adat**, akan terdiri atas:
- a. **Situs Sejarah dan Monumen** Meliputi kawasan tradisional, monumen nasional, bangunan bersejarah, kota kuno, desa adat, tempat ibadah, serta lokasi bersejarah lainnya seperti medan perang yang menjadi daya tarik wisata utama di berbagai negara.
 - b. **Museum dan Fasilitas Budaya Lainnya**
Merupakan wisata berbasis warisan alam dan budaya suatu daerah tertentu. Museum dapat dikembangkan berdasarkan tema, seperti museum arkeologi, sejarah, etnografi, sejarah alam, seni dan kerajinan, ilmu pengetahuan dan teknologi, industri, atau tema-tema khusus lainnya.¹⁹
- Mengatur kemampuan di darmawisata alam di daerah- daerah dikala ini banyak sekali darmawisata alam akan terkini bermunculan, perihal itu tidak bebas atas kedudukan warga setempat bersama atas penguasa wilayah pundak membahu buat mengembangka kemampuan darmawisata alam akan terdapat. Kemampuan darmawisata alam dapat atas bermacam berbagai pandangan, misalnya saja terdapat darmawisata alam ciptaan serta pula darmawisata alam natural, buatbisa menarik atensi warga kemampuan darmawisata alam akan diunggulkan wajib jadi barang penting. Selaku ilustrasinya Bareleng naga barang

¹⁹ Eka Pariyanti, Rinnanik, dkk, *Objek Wisata dan Pelaku Usaha*, (Surabaya:Pustaka Aksara, 2020) Hal 11.

penting wisatanya yakni ladang buah dragon akan terdapat di Bareleng.²⁰

METODE PENELITIAN

Dalam melaksanakan riset ini, pengarang memakai riset kualitatif akan bertabiat deskriptif. Posisi di Biro pariwisata, anak muda serta Berolahraga Kabupaten lima puluh kota atas tipe serta pangkal informasi ialah pokok serta inferior. Metode pengumpulan informasi dalam riset ini terdiri atas tanya jawab, pemilihan dan pemantauan. Aktivitas analisa informasi kualitatif dicoba atas cara berkepanjangan sampai berakhir riset, serta Miles serta Huberman menyuguhkan pola biasa analisa informasi atas memakai bentuk interaktif akan bisa diamati atas Lukisan 3. 1 di dasar ini:



HASIL DAN PEMBAHASAN

Peranan Khusus Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kab Lima Puluh Kota

1. Andil Spesial Biro Pariwisata, Anak muda serta Berolahraga Kabupaten

lima puluh kota dalam Proteksi Subjek Darmawisata di Nagari Harau

Proteksi subjek darmawisata spesialnya di Nagari harau hingga atas ini Biro Pariwisata, Anak muda serta Berolahraga Kabupaten lima puluh kota mempunyai sebuatan andil spesial dalam aktivitas kepariwisataan akan searah atas Peraturan Wilayah Provinsi Sumatera Barat No 3 Tahun 2014 selaku selanjutnya:

- a. Pelanggengan Lingkungan

Andil spesial Biro Pariwisata, Anak muda serta Berolahraga dalam mencegah subjek darmawisata yakni melindungi serta melestarikan area dekat akan bebas atas kontaminasi area semacam kotor, dan membuat regu pengawasan di alun- alun bersama Pokdarwis serta warga di dekat subjek darmawisata, tetapi begitu andil ini tidak berjalan atas maksimum sebab buat wisatawan sedang ada kotor disekitar subjek darmawisata alhasil diharapkan regu pengawasan bertugas lebih maksimal, bersinergi serta kilat dalam mengatasi kotor akan terdapat disekitar subjek darmawisata alhasil turis akan bertamu merasa aman serta

²⁰ Frangky Silitonga, Agung edi wibowo, dkk, *Pengembangan Objek Wisata, Sebagai Investasi Masyarakat Di Pulau Lance Batam,*

Jurnal Keker Wisata, Vol 1 No 1 Januari 2023, Hal 2.

balik melancong di subjek darmawisata Nagari Harau.

b. Kesamarataan Sosial

Andil spesial Biro Pariwisata, Anak muda serta Berolahraga dalam mencegah subjek darmawisata yakni berusaha menanggulangi ketidakseimbangan kewenangan, kurangi ketidaksetaraan, serta membenarkan kalau pariwisata membuatkan partisipasi positif keatas keselamatan sosial serta ekonomi warga.

c. Alat serta Infrastruktur akan Memfasilitasi

Andil spesial Biro Pariwisata, Anak muda serta Berolahraga dalam mencegah subjek darmawisata yakni melindungi alat serta infrastruktur khususnya tempat ibadah dalam menerapkan pariwisata syariah di subjek darmawisata sebab Sumatera Barat ataupun Indonesia atas kebanyakan masyarakat berkeyakinan Islam telah sepatutnya sediakan sarana tempat ibadah di subjek darmawisata. Perihal ini pula dibantu oleh tanya jawab atas warga dekat serta wisatawan di subjek darmawisata Nagari Harau, kalau tersedianya tempat ibadah buat sholat bisa mencegah subjek darmawisata atas marabahaya ataupun

kejadian sosial akan tidak di idamkan alhasil turis merasa nyaman serta aman buat melancong.

2. Andil Spesial Biro Pariwisata, Anak muda serta Berolahraga Kabupaten lima puluh kota dalam Melindungi serta Tingkatkan Advertensi Subjek Darmawisata di Nagari Harau

Andil spesial Biro Pariwisata, Anak muda serta Berolahraga dalam melindungi serta tingkatkan advertensi subjek darmawisata di Nagari Harau yakni atas cara langsung atas turis serta lewat sosial alat. Advertensi atas cara langsung dicoba atas memohon opini serta masukan keatas subjek darmawisata, ataupun menegaskan turis buat unggah gambar ataupun film pemilihan sepanjang terletak di subjek darmawisata ke sosial alatnya, sebaliknya advertensi lewat sosial alat yakni aktif unggah data terpaut subjek darmawisata semacam turis akan lagi main atau membuat konten alhasil jadi viral serta banyak wisatawan akan tiba ke subjek darmawisata di Nagari Harau.

3. Aplikasi Andil Biro Pariwisata, Anak muda, serta Berolahraga Bersumber atas Hukum No 10 Tahun 2009 dalam Proteksi Subjek Darmawisata di Nagari

Harau

Dalam bagan melakukan determinasi artikel 9 buatan(3) Hukum No 10 Tahun 2009 mengenai Kepariwisata hingga dikeluarkanlah Peraturan Wilayah Kabupaten lima puluh kota No 7 Tahun 2016 mengenai Konsep Benih Pembangunan Kepariwisata Kabupaten lima puluh kota Tahun 2016-2032, dituturkan kalau dalam bagan buat tingkatkan akselerasi pembangunan kepariwisataan Kabupaten lima puluh kota dalam mendesak kenaikan ekonomi wilayah, lewat kenaikan mutu destinasi pariwisata, pengembangan penjualan akan efisien, berdaya guna, serta bertanggung jawab, pengembangan kelembagaan serta aturan mengurus destinasi, pengembangan pabrik pariwisata serta kenaikan pemodalan pariwisata, dan pemberdayaan warga.

Visi pembangunan kepariwisataan Kabupaten 5 Puluh Kota, begitu juga di arti atas buatan(4) graf a yakni terwujudnya destinasi darmawisata Kabupaten lima puluh kota akan mempunyai energi raih selaku tujuan pariwisata penting Sumatera Barat akan beridentitas adat serta agama buat keselamatan warga. Oleh sebab itu, dalam menciptakan visi pembangunan kepariwisataan Kabupaten lima puluh kota begitu juga diartikan atas buatan(4) ditempuh lewat 5(5) tujuan pembangunan kepariwisataan Kabupaten lima puluh kota

mencakup: 1) meningkatkan destinasi pariwisata berakal saing nasional, berwawasan area serta sanggup mendesak pembangunan area, 2) meningkatkan penjualan pariwisata buat tingkatkan kunjungan turis, 3) meningkatkan pabrik pariwisata berplatform kemampuan lokal, 4) tingkatkan profesionalisme pengurusan pariwisata lewat kenaikan mutu kelembagaan, manajemen serta pangkal energi orang atas berdasar Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah(ABS-SBK), serta 5) meningkatkan ekonomi inovatif akan bisa tingkatkan angka imbuhan ekonomi warga serta wilayah.

Pembangunan Infrastruktur Biasa, Sarana Biasa, serta Sarana Pariwisata ada dalam Artikel 23 buatan(1), di mana strategi buat pengembangan infrastruktur biasa, sarana biasa, serta sarana pariwisata dalam mensupport pengembangan di tiap area DUPK, buatan(2), di mana strategi buat kenaikan guna infrastruktur biasa, sarana biasa, serta sarana pariwisata dalam mensupport perkembangan, tingkatkan mutu serta energi saing di tiap area DUPK. Tidak hanya itu, dalam tingkatkan advertensi subjek darmawisata tertuang dalam Artikel 35 buatan(2), di mana strategi buat membuat kegiatan serupa atas pelakon pariwisata lewat penerapan familiarization trip buat menguatkan kegiatan serupa eksploitasi data

pasar pariwisata oleh pelakon pariwisata atas negara- negara pangkal turis ke bermacam destinasi di Kabupaten 5 Puluh Kota.

4. Aplikasi andil Biro Pariwisata, Anak muda, serta Olahraga

Bersumber atas Hukum No 10 Tahun 2009 dalam Proteksi Subjek Darmawisata di Nagari Harau yakni atas dikeluarkannya Peraturan Wilayah Kabupaten lima puluh kota No 7 Tahun 2016 mengenai Konsep Benih Pembangunan Kepariwisata Kabupaten lima puluh kota Tahun 2016- 2032 selaku anak atas Hukum No 10 tahun 2009 mengenai Kepariwisata. Lewat peraturan wilayah ini, Biro Pariwisata, Anak muda, serta Berolahraga Kabupaten lima puluh kota bisa mengukur sepanjang mana aplikasi pembangunan kepariwisataan di Kabupaten lima puluh kota bisa berjalan.

KESIMPULAN

Andil spesial Biro Pariwisata, Anak muda serta Berolahraga Kabupaten lima puluh kota dalam Proteksi Subjek Darmawisata di Nagari Harau yakni pelanggaran area, membuat kesamarataan sosial buat tiap orang, serta membuat alat serta infrastruktur akan menjunjung besar darmawisata syariah.

Andil spesial Biro Pariwisata, Anak muda serta Berolahraga Kabupaten lima

puluh kota dalam Melindungi serta Tingkatkan Advertensi Subjek Darmawisata di Nagari Harau yakni atas cara langsung atas turis serta lewat sosial alat. Advertensi atas cara langsung dicoba atas memohon opini serta masukan keatas subjek darmawisata, ataupun menegaskan turis buat unggah gambar ataupun film pemilihan sepanjang terletak di subjek darmawisata ke sosial alatnya, sebaliknya advertensi lewat sosial alat yakni aktif unggah data terpaut subjek darmawisata ke sosial alat.

Aplikasi andil Biro Pariwisata, Anak muda, serta Berolahraga Bersumber atas Hukum No 10 Tahun 2009 dalam Proteksi Subjek Darmawisata di Nagari Harau yakni dikeluarkannya Peraturan Wilayah Kabupaten lima puluh kota No 7 Tahun 2016 mengenai Konsep Benih Pembangunan Kepariwisata Kabupaten lima puluh kota Tahun 2016- 2032 dalam bagan tingkatkan akselerasi pembangunan kepariwisataan lewat kenaikan mutu destinasi pariwisata, pengembangan penjualan akan efisien, berdaya guna, serta bertanggung jawab, pengembangan kelembagaan serta aturan mengurus destinasi, pengembangan pabrik pariwisata serta kenaikan pemodalan pariwisata, dan pemberdayaan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anis Setiyorini, Umi Farida, dkk, Efek advertensi lewat alat sosial, word of mouth, serta energi raih darmawisata keatas ketetapan bertamu turis obyek darmawisata Gunung Beruk Karangpatihan Balong, Vol 2 Nomor 1 April 2018, Perihal 13.
- Biro Pariwisata, Anak muda serta Berolahraga Kabupaten 5 Puluh Kota
- Biro Pariwisata, Anak muda serta Berolahraga Kabupaten 5 Puluh Kota
- Dwi Setiawan, I. B.“ Pengenalan Kemampuan Darmawisata Bersama 4A(Attraction, Amenity, Accesibility, Anchillary) di Desa Pangkal Harum, Dusun Pemuteran, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng.” Bali, Universitas Udayana.
- Eka Pariyanti, Rinnanik, dkk, Subjek Darmawisata serta Pelakon Upaya,(Surabaya: Pustaka Aksara, 2020)
- Eka Revida, Pengantar Pariwisata, Area: Yayasan Kita Menulis, perihal. 4.
- Fahadil Amin, Penajaan Pariwisata Halal di Indonesia(Analisa Ajaran DSN atau MUI mengenai Prinsip Penajaan Pariwisata Bersumber atas Prinsip Syariah), Jakarta, perihal. 63.
- Ajaran DSN- MUI Nomor. 108 atau DSN- MUI atau X atau 2016 mengenai Prinsip Penajaan Pariwisata Bersumber atas Prinsip Syariah.
- Frangky Silitonga, Agung edi Wibowo, dkk, Pengembangan Subjek Darmawisata, Selaku Pemodalan Warga Di Pulau Lance Batam, Harian Keker Darmawisata, Vol 1 Nomor 1 Januari 2023, Perihal 2.
- H. Inu Emas Syafie, Pengantar Ilmu Pariwisata, Jakarta: Mandar Maju, 2009, perihal 15.
- I Ketut Suwena serta I Buatnda Ngurah Widyatmaja, Wawasan Bawah Ilmu Pariwisata, Pustaka Larasan, Bali, 2017, hlm. 20.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Versi Kedua, Cet. 1, Jakarta, Gedung Pustaka, hlm. 595.
- Kurnia Maulida, serta Achamad Zurohman,“ Peluang Pariwisata Syariah(Halal Tourism): Suatu Tantangan di Masa Revolusi Pabrik 4. 0” AQUILIBRIUM: Harian Ekonomi Syariah, Vol. 8, Nomor. 2, 2020, perihal. 281.
- Kurniawan Gilang Widagdyo,“ Analisa Pasar Pariwisata Indonesia, The Journal of Tauhidinomics, Vol. 1, Nomor. 1, 2015, perihal. 149.
- Muhammad Ghafur Wibowo. Indikator Pariwisata Halal(Aplikasi Ajaran DSN MUI Mengenai Prinsip Penajaan Pariwisata Bersumber atas Prinsip

- Syariah di Kota Bukittinggi). *Harian Ekonomi Syariah Indonesia*, Vol X Nomor. 2, Perihal 91.
- Ni Ketut Riani, Pariwisata yakni pisau bermata 2, *Harian Inovasi Riset*, Vol 2 Nomor 5 Oktober 2021, Perihal 1469.
- Peraturan Wilayah Kabupaten lima puluh kota No 7 Tahun 2016 mengenai Konsep Benih Pembangunan Kepariwisata Kabupaten lima puluh kota Tahun 2016- 2032
- Peraturan Wilayah Kabupaten lima puluh kota No 7 Tahun 2016 mengenai Konsep Benih Pembangunan Kepariwisata Kabupaten lima puluh kota Tahun 2016- 2032
- Peraturan walikota Pasuruan Nomor 21 Tahun 2022.
- Konsep Kegiatan DISPARPORA Kab 5 Puluh Kota 2022.
- Rimet,“ Strategi Pengembangan Darmawisata Syariah di Sumatera Barat: Analisa SWOT.” *Harian Rumpun Ekonomi Syariah*, Vol 2, Nomor, 1,(2019), perihal. 55.
- Rizki Amelia, Adella Patricia, *Journal Of Tourism and Creativity*, Vol 5 Nomor 1 Januari 2021
- Saepudin serta Sutomo, Aanalisis Analogi Penginapan serta Pariwisata Syariah atas Konvensional Bogor, Bogor: Magister Manajemen Syariah IPB.
- Setiono, 2004, *Daulat Hukum*, UNS, Surakarta, hlm. 3.
- Soerjono Soekanto, 1982, *Pengantar Riset Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 133.
- Soerjono Soekanto, 2002, *Ilmu masyarakat Sesuatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 212.
- Hukum No 9 Tahun 1990 mengenai Kepariwisata
- Penting I Buatnda Baik Rai, *Penjualan Pariwisata*, Yogyakarta: CV. Andi, 2017.
- Yudhi, Martha Nugraha,“ Analisa Kemampuan Advertensi Pariwisata Halal Lewat E- Marketing Pulau Riau.” *Harian Riset serta Buatan Objektif Badan Riset Universitas Trisakti*, Vol 3, nomor 2, 2018, perihal. 65.